TESIS

IMPLIKASI HUKUM DALAM PEMBUKAAN REKAM MEDIS UNTUK PROSES KLAIM ASURANSI KESEHATAN SWASTA DI RS MAYAPADA SURABAYA

Tjio Violita Tjahyono

NIM 24.C2.0032

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

IMPLIKASI HUKUM DALAM PEMBUKAAN REKAM MEDIS UNTUK PROSES KLAIM ASURANSI KESEHATAN SWASTA DI RS MAYAPADA SURABAYA

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan

Diajukan Oleh

Tjio Violita Tjahyono

NIM 24.C2.0032

Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2026

ABSTRAK

Pembukaan rekam medis dalam proses klaim asuransi kesehatan swasta merupakan suatu kebutuhan administratif yang sering dilakukan untuk kepentingan verifikasi dan validasi klaim. Namun, di sisi lain rekam medis mengandung informasi kesehatan yang bersifat rahasia dan termasuk data pribadi yang wajib dilindungi oleh hukum. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait batasan pembukaan rekam medis, perlindungan hak privasi pasien, serta tanggung jawab hukum apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pembukaan rekam medis dalam proses klaim asuransi kesehatan swasta di RS Mayapada Surabaya, implikasi hukum yang timbul apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data rekam medis, serta bentuk perlindungan hukum bagi pasien terkait kerahasiaan data rekam medisnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan ahli hukum kesehatan, dokter yang bekerja di bidang asuransi, petugas rekam medis RS Mayapada Surabaya, dan perwakilan perusahaan asuransi kesehatan swasta. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan hukum kesehatan, perlindungan data pribadi, rekam medis, dan perasuransian. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukaan rekam medis untuk proses klaim asuransi kesehatan swasta di RS Mayapada Surabaya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Proses pembukaan rekam medis dilakukan melalui permintaan resmi dari perusahaan asuransi, verifikasi administrasi, penerapan standar operasional prosedur, persetujuan pasien, serta pembatasan data yang diberikan sesuai kebutuhan klaim. Implikasi hukum yang dapat timbul akibat kebocoran atau penyalahgunaan data rekam medis meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana bagi rumah sakit maupun tenaga medis. Adapun perlindungan hukum bagi pasien diwujudkan melalui mekanisme perlindungan preventif dan represif, antara lain melalui informed consent, pembatasan akses data, hak mengajukan keberatan, dan hak memperoleh ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data medis. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan regulasi teknis mengenai batas pembukaan data medis, mekanisme persetujuan elektronik, dan standar pengawasan akses data guna meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan hak privasi pasien.

Kata Kunci: Rekam Medis, Klaim Asuransi Kesehatan, Kerahasiaan Data Medis, Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Hukum Pasien.

ABSTRACT

The disclosure of medical records in the process of private health insurance claims is an administrative necessity commonly undertaken for the purpose of claim verification and validation. On the other hand, medical records contain confidential health information that constitutes personal data and is therefore subject to legal protection. This situation raises legal issues concerning the limitations on the disclosure of medical records, the protection of patients' privacy rights, and legal liability in the event of a breach or misuse of medical data. This study aims to analyze the legal framework governing the disclosure of medical records in the process of private health insurance claims at Mayapada Hospital Surabaya, the legal implications arising from the breach or misuse of medical record data, and the forms of legal protection available to patients in relation to the confidentiality of their medical data.

This study employs a ***socio-legal research method*** *with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews with health law experts, physicians involved in insurance-related services, medical record officers at Mayapada Hospital Surabaya, and representatives of private health insurance companies. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials relating to health law, personal data protection, medical records, and insurance law. All data were analyzed qualitatively by examining the conformity between applicable legal provisions and practices implemented in the field.*

The results of the study indicate that the disclosure of medical records for private health insurance claims at Mayapada Hospital Surabaya is carried out based on ***Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, and Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning Medical Records****. The disclosure process is conducted through an official request from the insurance company, administrative verification, implementation of standard operating procedures, patient consent, and limitation of the information disclosed to data relevant to the claim. Legal implications arising from the breach or misuse of medical record data may include administrative, civil, and criminal liability for hospitals and healthcare professionals, depending on the nature and circumstances of the violation. Legal protection for patients is provided through preventive and repressive mechanisms, including informed consent, restrictions on data access, the right to object, and the right to seek compensation in the event of a violation of medical data confidentiality. Nevertheless, further strengthening of technical regulations is required, particularly regarding the scope and limitations of medical data disclosure, mechanisms for electronic consent, and standards for monitoring and controlling data access, in order to enhance legal certainty and strengthen the protection of patients' privacy rights.*

Keywords: Medical Records, Health Insurance Claims, Medical Data Confidentiality, Personal Data Protection, Patient Legal Protection.